

PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI ASET KOMUNITAS

Oleh

Ida Purwastuty

Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung

Email: ida.purwastuty@yahoo.co.id

Abstrak: Penurunan kemiskinan di Indonesia sejalan dengan ketimpangan nasional. Namun di beberapa provinsi angka ketimpangan masih di atas angka ketimpangan nasional. Hal tersebut menunjukkan penurunan angka ketimpangan masih bergerak fluktuatif. Salah satu faktor penurunan kemiskinan adalah adanya bantuan sosial. Jika terjadi perubahan kebijakan pada dukungan bantuan sosial diluar kendali keluarga miskin maka, angka kemiskinan maupun ketimpangan dapat meningkat. Sehingga perlu pendekatan lain dalam penurunan kemiskinan yaitu pemberdayaan melalui aset komunitas. Tulisan ini dimaksud menjelaskan satu pendekatan dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui aset komunitas seperti aset fisik, finansial, manusia, sosial dan spiritual yang ada di sekitar keluarga miskin. Aset fisik dapat digunakan sebagai wadah/tempat proses pemberdayaan, aset finansial dapat dioptimalkan sebagai sumber peminjaman uang/modal, aset manusia dapat dioptimalkan sebagai pemberi dukungan, aset sosial dapat dioptimalkan sebagai ikatan untuk saling membantu dan berdaya, dan aset spiritual dapat dioptimalkan sebagai dasar untuk saling membantu antar sesama. Pengoptimalan aset-aset komunitas tersebut dapat membantu keluarga miskin dalam mengatasi masalahnya yang multidimensi. Pemanfaatan aset komunitas dapat menyadarkan keluarga miskin akan aset disekitarnya tanpa harus tergantung dengan pihak luar sehingga dapat mandiri.

Kata Kunci: Aset Komunitas, Keluarga miskin, Pemberdayaan

EMPOWERMENT OF POOR FAMILY THROUGH COMMUNITY ASSETS

By

Ida Purwastuty

Alumni Postgraduate Specialist 1 STKS Social Work Bandung

Email: ida.purwastuty@yahoo.co.id

Abstract: The reduction poverty in Indonesia is in line with national inequality. But in some provinces the rate of inequality is still above the national inequality figure. This shows a decrease in the number of inequality is still moving fluctuatively. One factor in reducing poverty is the presence of social assistance. If a policy change occurs in support of social assistance beyond the control of poor families, poverty and inequality can increase. So it needs another approach in reducing poverty, namely empowerment through community assets. This article is intended to explain one approach in empowering poor families through community assets such as physical, financial, human, social and spiritual assets that exist around poor families. Physical assets can be used as a place / place of empowerment processes, financial assets can be optimized as a source of lending money / capital, human assets can be optimized as providers of support, social assets can be optimized as bonds to help and empower, and spiritual assets can be optimized as a basis for helping each other Optimizing community assets can help poor families overcome their multidimensional problems. The use of community assets can make the poor family aware of the surrounding assets without having to depend on outsiders so they can be independent.

Keywords: Community Assets, Empowerment, Poor Families,

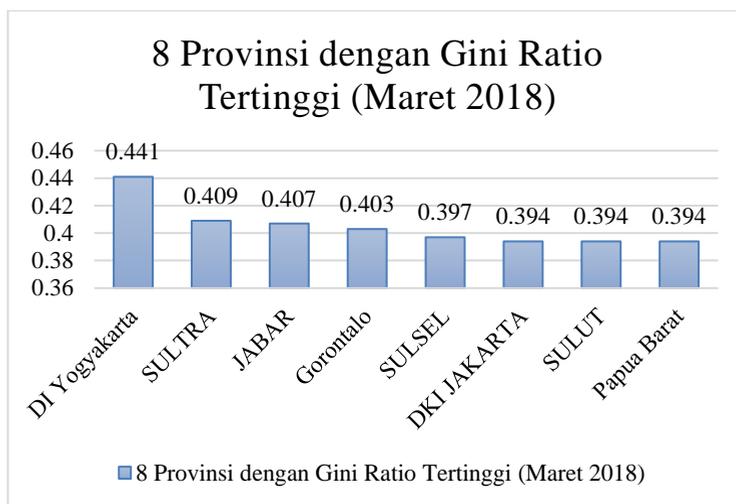
A. Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus

perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengikuti pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 mencapai 28,95 juta orang dengan presentase penduduk miskin sebesar 9,82%. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan September 2017. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,3% penduduk miskin. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kompas.com (19/07/2018), Tiga Faktor yang membuat angka kemiskinan turun di 2018 selama September 2017-Maret 2018 adalah 1) terjadi inflasi umum sebesar 1,92 %. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi adalah 2) bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (RASTRA), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah turun tepat waktu, serta 3) tingginya nilai tukar petani sebesar 101,94 di atas 100.

Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia belum sejalan dengan gini ratio atau angka ketimpangan di Provinsi. Ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia pada Maret 2018 mengalami penurunan. Namun, di beberapa provinsi angka ketimpangan masih di atas angka ketimpangan nasional. Berikut 8 provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia menurut BPS.



Sumber: BPS (Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2018)

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa ketimpangan di 8 Provinsi masih di atas rata-rata ketimpangan nasional yaitu sebesar 0,389. Masalah kemiskinan perlu diperhatikan secara menyeluruh dan kontinu karena penurunan ketimpangan masih bisa bergerak fluktuatif, terkhusus pada pemberian program bantuan sosial. Jika program bansos tidak kontinu maka, angka kemiskinan maupun ketimpangan memungkinkan untuk kembali naik. Oleh karena itu, perlu melihat masalah kemiskinan secara multidimensi.

Sumodiningrat (1998:26) mengatakan bahwa Masalah kemiskinan yang dihadapi, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkait dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

Kompleksnya masalah kemiskinan, membuat pemerintah dan dunia usaha/swasta tidak hanya melihat satu aspek ekonomi

melainkan aspek lain seperti psikososial dan spiritual. Intervensi yang dapat dilakukan tidak hanya dengan memberikan bantuan tetapi memanfaatkan/mengoptimalkan sistem sumber/potensi yang ada disekitar masyarakat atau keluarga miskin agar dapat mandiri jika terjadi kejadian diluar kendali.

Sifat multidimensi yang dimiliki oleh kemiskinan mendorong berbagai disiplin ilmu dan profesi untuk mengkajinya sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam akan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk merumuskan upaya-upaya dalam menangani kemiskinan yang tepat dan efektif. Salah satu pendekatan untuk mengkaji kemiskinan adalah pendekatan berbasis aset komunitas. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh pekerjaan sosial dengan melakukan pemberdayaan. Inti dari pendekatan pekerjaan sosial dalam kajian kemiskinan adalah peningkatan keberfungsian sosial masyarakat miskin sehingga dapat menjalankan peran-peran sosial dan memanfaatkan sistem sumber/potensi di lingkungannya baik perkotaan dan pedesaan.

Wilayah perkotaan pada umumnya dipahami sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang sangat individual, penuh kemewahan, gedung-gedung yang menjulang tinggi, kendaraan yang lalu-lalang, perkantoran yang mewah serta pabrik-pabrik yang besar. Kota seringkali dianggap sebagai tempat tujuan masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan, sebab pusat-pusat industri berkembang di daerah perkotaan. Padahal, di perkotaan juga ditemui beberapa kelompok pekerja di sektor informal, seperti penarik becak, tukang sapu jalan, pemulung, hingga pengemis. Banyak diantara warga kota tidak beruntung yang hidup di bawah standar kehidupan sosial yang normal.

Daerah perkotaan yang metropolitan tidak lepas dari masalah kemiskinan. Salah satu permasalahan kemiskinan diperkotaan adalah kasus terlibat rentenir. Penyebab keluarga miskin terlibat dengan rentenir adalah tidak teraksesnya sumber finansial formal karena mayoritas keluarga miskin bekerja di sektor informal seperti pedagang, penjahit, buruh, pembantu rumah tangga, tukang ojeg, pemulung, dan sopir angkot. Para rentenir berkedok sebagai koperasi keliling mendatangi rumah-rumah

keluarga miskin untuk meminjamkan uang dengan syarat hanya foto copy KTP.

Masalah tersebut bias diatasi dengan memanfaatkan/mengoptimalkan aset komunitas sebagai potensi yang dimiliki keluarga miskin dalam mengatasi masalah ekonominya. Menurut Gary Paul Green (2002) bahwa pemanfaatan aset komunitas dalam pemberdayaan masyarakat (*aset based community development*) memiliki beragam rangkaian tujuan, mulai dari memecahkan masalah lokal, mengatasi ketimpangan, serta meningkatkan potensi individu, dan membangun rasa kebersamaan. Konsep *aset based community development* merupakan metode yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat sebagai sarana untuk pengembangan berkelanjutan yang didalamnya terdapat proses pengembangan untuk melihat potensi apa saja yang dimiliki keluarga miskin. Christopher Derau (2013) menyatakan ada tujuh dimensi utama pemberdayaan masyarakat berbasis aset yaitu aset fisik, lingkungan, manusia, teknologi, finansial, sosial dan spiritual.

B. Pembahasan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang sifatnya global. Hampir setiap negara di dunia tak luput dari adanya kemiskinan. Indonesia sendiri kajian mengenai kemiskinan sudah banyak diperbincangkan oleh para ahli, mulai dari penyebab timbulnya hingga bagaimana cara menanggulangi kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Lavitan dalam Sudarwati (2009) kemiskinan diartikan sebagai berikut “kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”. Menurut Suparlan dalam bukunya yang berjudul *Kemiskinan di Perkotaan* (2013), pengertian kemiskinan adalah: Suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Adapun Friedman dalam Suharto (2014) menegaskan bahwa

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, kemiskinan dipandang sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, meliputi aset produktif dan aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber-sumber keuangan (pendapatan, kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama (partai politik, koperasi, kelompok usaha, kelompok simpan pinjam), network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk memajukan hidup.

Selanjutnya Zastrow (1982) menyatakan kemiskinan mengakibatkan hal-hal berikut: *“poverty also often leads to despair, low self esteem, and stunted growth - including physical, social, emotional, and intellectual growth. Poverty hurts most when it leads to a view of the self as inferior or second class”*. Menurutnya, kemiskinan sering menyebabkan putus asa, harga diri rendah, terhambatnya perkembangan fisik, sosial emosional dan intelektual serta yang paling menyakitkan karena adanya pandangan pribadi sebagai kelas yang rendah atau kelas dua.

Penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan keluarga miskin, sehingga keluarga miskin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan karena keluarga miskin tidak mampu mengakses sistem sumber atau potensi yang ada disekitarnya akibat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki aset atau keterampilan yang memadai. Selain itu karena malas bekerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), beban keluarga yang tinggi, tidak adanya jaminan sosial, serta hidup terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Empat faktor lain, penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Khomsan, dkk (2015:3-4) yaitu:

- a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak lain.
- d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Adapun penyebab kemiskinan yang sering terjadi di perkotaan adalah kemiskinan relatif, kultural dan struktural. Pembangunan fisik di perkotaan dari sawah menjadi daerah industri dan kompleks perumahan menyebabkan kemiskinan relatif berupa ketimpangan pada pendapatan bagi mereka yang tinggal di daerah perkampungan. Penyebab lain yaitu kultural berupa budaya keluarga miskin yang boros, tidak biasa menabung, mudah putus asa dan penyebab struktural yaitu rendahnya kemampuan keluarga miskin dalam mengakses sumber daya yang ada (aset komunitas).

Untuk memutus lingkaran rantai penyebab kemiskinan tidak hanya fokus pada satu aspek, melainkan seluruh aspek. Salah satu cara dalam memutus rantai penyebab kemiskinan yaitu dengan pendekatan pemberdayaan (*empowering*) dengan penekanan kepada upaya menumbuhkembangkan kerjasama dan keterpaduan antara unsur multi pihak (*stakeholders*), menumbuhkan fungsi partisipasi multi pihak dalam bentuk swadaya seperti bentuk tenaga dalam mendidik, membina, peningkatan keterampilan, sumber daya manusia (intelektual) dan bentuk materi.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Menurut M. Anwas (2014) bahwa konsep pemberdayaan berkembang dari realitas keluarga miskin yang tidak berdaya (*powerless*) dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, aset usaha, *networking*, kerja keras, dan lainnya. Pemberdayaan identik dengan konsep kekuasaan (*power*) atau makna ”memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan, sehingga memiliki keberdayaan. Keberdayaan diberikan oleh pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi. Selanjutnya, (1988:240) mengemukakan bahwa:

.....*people centered development* merupakan paradigma alternatif bagi paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi dan membentangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang sangat luas guna menciptakan sebuah masyarakat dunia yang benar-benar manusiawi. Pemberian kekuasaan pada masyarakat untuk mengendalikan kehidupan dan sumber daya masyarakat sendiri, untuk menciptakan kehidupan dari sumber daya itu dan mengarahkan serta mengembangkan diri mereka sebagai manusia merupakan tujuan pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapainya.

Ada 3 karakter umum program pemberdayaan masyarakat (*community development*) menurut Rudito (2013:21), yaitu:

- a) Berbasis masyarakat (*community-based*) atau masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
- b) Berbasis sumberdaya setempat (*local resources-base*), yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada
- c) Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ditujukan untuk membawa keluarga miskin kurang beruntung kepada keluarga miskin yang lebih adil yang akan memperkuat anggota komunitas lokal untuk berupaya mewujudkan komunitas dengan berbasis struktur yang efektif. Proses pemberdayaan, keluarga miskin sebagai kesatuan yang utuh, dilibatkan, dan diberikan semangat untuk melakukan pengendalian

pada kegiatan mereka sendiri dan melalui program ini dapat lebih mampu mengendalikan kehidupan komunitas mereka.

Pemecahan masalah keluarga miskin di diperkotaan dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan menurut Oakley dan Pranarka dalam Hikmat (2006) mengandung dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer yaitu fokus pada memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*powerful*) kepada keluarga miskin (*powerless*) melalui aset/potensi yang dimiliki. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu fokus pada memotivasi keluarga miskin untuk mempunyai kemampuan atau berdaya untuk membantu menyelesaikan masalahnya melalui proses dialog. Proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis aset.

Pendekatan berbasis aset memasukkan cara pandang baru yang lebih holistik dan kreatif dalam melihat realitas, seperti melihat gelas setengah penuh; mengapresiasi apa yang bekerja dengan baik di masa lampau, dan menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Christoper Derau (2013). Pendekatan ini lebih memilih cara pandang bahwa suatu masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan. Bahkan masyarakat pedagang buah sawo yang sedianya berpendidikan tidak tinggi pada dasarnya bisa mengolah potensi yang ada pada mereka. Hanya saja kesadaran akan potensi tersebut sering kali tertutup oleh karena tekanan yang ada, dan juga keengganan untuk bangkit dari titik nyaman yang selama ini telah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan.

Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan mereka dan kemungkinan perubahan secara berbeda. Mempromosikan perubahan fokus pada apa yang ingin mereka capai dan membantu mereka menemukan cara baru dan kreatif untuk mewujudkan visi mereka. Christoper Derau (2013) menjelaskan pendekatan berbasis aset diarahkan pada perubahan cara pandang masyarakat dengan mengandaikan diri sebagai gelas yang setengah penuh. Derau menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat hanya perlu memandang keberadaan potensi sebagai sebuah jalan keluar dari permasalahan pada tingkat komunitas.

Lebih lanjut, Christopher Derau (2013) menjelaskan tentang dimensi aset komunitas yang terdiri dari 7 (tujuh) aset sebagai berikut :

1. Aset Manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Model ini mewakili unsur pengetahuan, perspektif, mentalitas, keahlian, pendidikan, kemampuan kerja, dan kesehatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Aset Fisik
Aset ini mewakili unsur bangunan (seperti : perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Aset Finansial
Aset ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman aset usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat.
4. Aset Teknologi
Aset ini mewakili sistem atau peranti lunak (*software*) yang melengkapi aset fisik (seperti teknologi pengairan sawah, teknologi penyaringan air, teknologi pangan, teknologi cetak jarak jauh dan berbagai teknologi lainnya) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Aset Lingkungan
Aset ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat.
6. Aset Sosial

Sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka.

7. Aset Spiritual

Upaya pemberian bantuan *empathy* dan perhatian, kasih sayang, dan unsur utama dari kebijakan praktis.

Sedangkan, United Kingdom *Departement for International Development* (DFID) dalam Carney et.al (1999), mengidentifikasi ada 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan (*livelihoods*), yaitu: Aset Manusia (*Human Capital*); Aset Fisik (*Fisical Capital*); Aset Sosial (*Social Capital*); Aset Finansial (*Financial Capital*); Aset lingkungan (*Environmental Capital*). Selain penjelasan pakar di atas, terdapat kajian lain terkait pemberdayaan keluarga miskin melalui aset komunitas. Fedryansyah dan Risna (2017) mengkaji tentang penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan aset komunitas di Kabupaten Sumedang. Kajian ini fokus dalam melihat adanya aset komunitas yang dapat dikembangkan dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa aset yang dapat dimanfaatkan adalah aset fisik, manusia dan sosial.

Rizqi Iqbal (2018) meneliti tentang pemberdayaan komunitas pinggiran kota melalui penguatan ekonomi dengan menggunakan pendekatan *Aset Based Community Development* (ABCD). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD menekankan pada berbagai aset yang dimiliki melalui proses penyadaran terhadap aset, menghubungkan dan menggerakkan aset, hingga mengoptimalkan aset agar masyarakat lebih berdaya tanpa ketergantungan terhadap pihak luar. Pendekatan ABCD membuat perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya tidak menyadari aset yang dimiliki.

Kajian lain dalam pemanfaatan aset komunitas melalui pendekatan *Appreciative Inquiry* (AI) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat oleh Jaeni Dahlan (2016). Fokus kajian ini pada aset alam, material, sosial, finansial, manusia dan politik dengan menggunakan pendekatan AI yang dilaksanakan pada 4D proses yaitu *discovery*, *dream*, *design* dan *destiny*. Hasil kajian

ini menunjukkan bahwa pendekatan AI dengan metode *community work* yang dilakukan pekerja sosial cukup efektif dalam mengembangkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dibuat matrik beberapa aset komunitas disekitar keluarga miskin perkotaan yang dapat dimanfaatkan.

Matrik 1 Aset Komunitas

No	Jenis Aset	Daftar Aset
1	Aset Fisik	1. Masjid 2. Mushola 3. Kantor dan aula Kelurahan 4. Pasar 5. Perumahan 6. Sarana pendidikan
2	Aset Manusia	1. Tokoh Agama 2. Tokoh masyarakat 3. Lurah dan Kaur Kesra 4. Ketua Koperasi 5. Bidan 6. Ketua LPM
3	Aset Finansial	1. Arisan 2. Rentenir 3. Koperasi 4. Bank
4	Aset Sosial	Ada kepercayaan, Ada nilai Gotong Royong seperti Gerakan Pungut Sampah, Gober, Linmas Hubungan kekeluargaan antar keluarga miskin baik
5	Aset Spiritual	1. Pengajian anak-anak, 2. ZIS 3. DKM 4. Subuh Keliling (SubLing) 5. Majelis Taqlim

Berdasarkan matrik di atas, diketahui bahwa aset komunitas yang dimaksud adalah Aset fisik yaitu aset berupa infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kelurahan untuk digunakan dalam membantu keluarga miskin mencapai kehidupan yang lebih baik. Aset finansial yaitu aset dasar yang ada dan dimiliki keluarga miskin untuk mencapai kesejahteraan. Aset lingkungan yaitu aset yang

berdasarkan kepada sumberdaya alam yang ada. Aset sosial yaitu sebuah kesatuan, nilai dan norma yang mengatur hubungan satu sama lainnya. Aset manusia yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan/kekuatan dalam membantu atau *stakeholder*.

Aset komunitas tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi dan sumber yang sebenarnya dapat dioptimalkan untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin. Namun demikian, hal tersebut tidak terjadi karena ketidakberdayaan keluarga miskin dalam memanfaatkan aset komunitas yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan keluarga miskin oleh pekerja sosial untuk melakukan intervensi yang bersifat komprehensif yang dapat menyentuh seluruh aspek seperti ekonomi, psikologis, sosial, budaya dan politik.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan keluarga miskin dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset komunitas yang ada di sekitar tempat tinggalnya baik aset fisik, aset finansial, aset manusia, aset social dan aset spiritual. Aset fisik dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dari keluarga miskin dan *stakeholder* dalam proses pemberdayaan keluarga miskin, aset finansial dapat dioptimalkan untuk peminjaman uang atau modal agar tidak ke rentenir seperti koperasi, aset manusia dapat dioptimalkan untuk membantu dalam memberikan dukungan seperti *stakeholder*, aset sosial dapat dioptimalkan sebagai ikatan (*bounding*) untuk saling membantu dan berdaya antara *powerfull* dan *powerless*, dan aset spiritual dapat dioptimalkan sebagai dasar membantu sesama.

Daftar Pustaka

- Carney, D, Michael Drinkwater, Tamara Rusinow, Koos Neefjes, Samir Wanmali, Naresh Singh. 1999. *Livelihood Approaches Compared: a brief comparison of the livelihoods approaches of the UK Department for International Development (DFID), CARE, Oxfam and the UNDP*. Eldis Document Store.
- Christoper Derau. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan. Australian Community Development and Civil*

- Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II: TT Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gary Paul Green & Anna Haines. 2002. *Asset Building and Community Development*. London : Sage Publicatio
- Hikmat, R. Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama
- Khomsan, Ali dkk. 2015. Indikator kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- M. Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Gobar*. Bandung: Alfabeta
- Rudito, Bambang & Famiola Melia. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Penerbit Rekayasa Sains
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: Intimedia
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sumodiningrat, G., 1998. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA
- Suparlan, Parsudi. 2014. *Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan
- Zastrow, Charles .1982. *Introduction to social welfare institutions: social problems, services and current issues*. Illinois: the Dorsey Press
- Sumber lain:**
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. 2018. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret 2018*. Jakarta :Badan Pusat Statistika Provinsi Jakarta-Indonesia
- Badan Pusat Statistika Indonesia. 2018. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistika
- Fedryansyah & Risna. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan aset komunitas*. Jurnal Pusat studi kewirausahaan sosial dan pengembangan masyarakat fisp-UNPAD, 1, 1-129.
- Jaeni Dahlan. 2016. *Pemanfaatan Komunitas melalui Pendekatan*

Appreciative Inquiry dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial STKS, 15,2, 275-297.

Rizqi Iqbal Amirullah. 2018. *Pemberdayaan Komunitas Pinggiran Kota*.
Digilib.uinsby.ac.id